



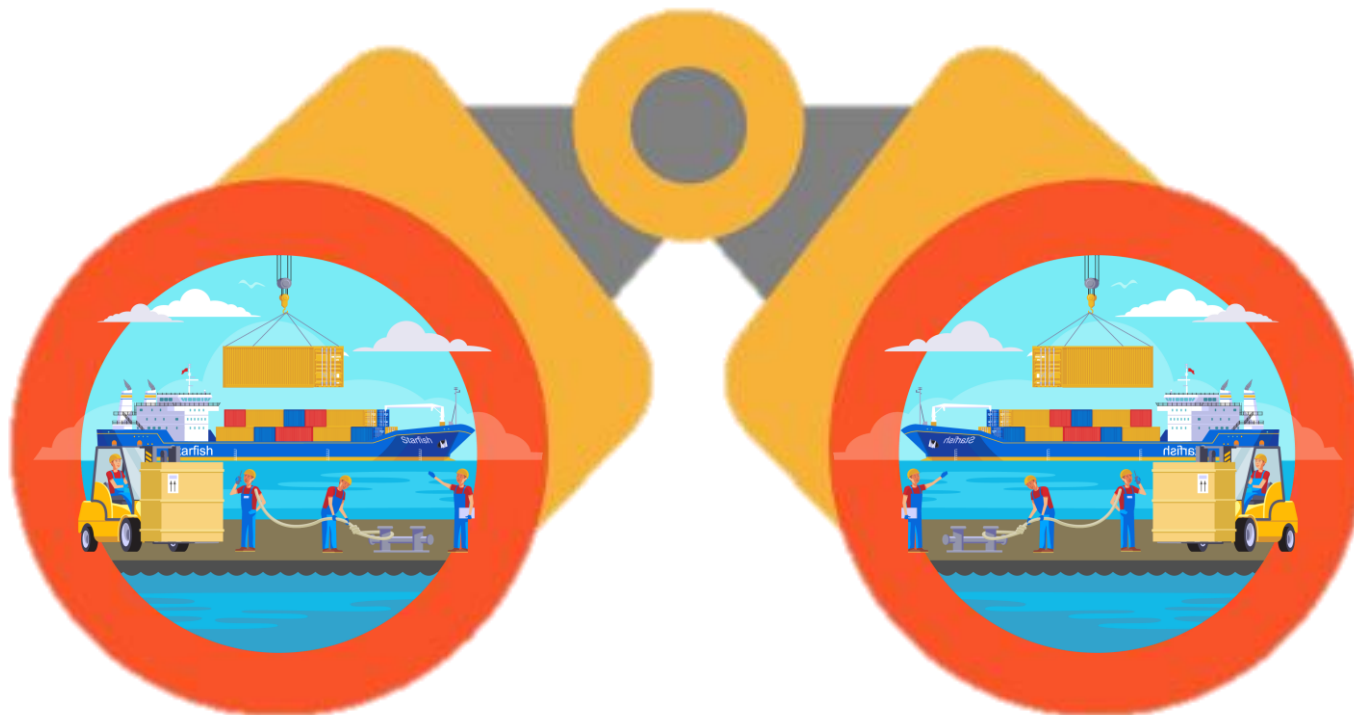
Kementerian
Dalam Negeri



KEMENTERIAN PERIKANAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYELANGGA NELAYAN
RAKAT BERENCANA



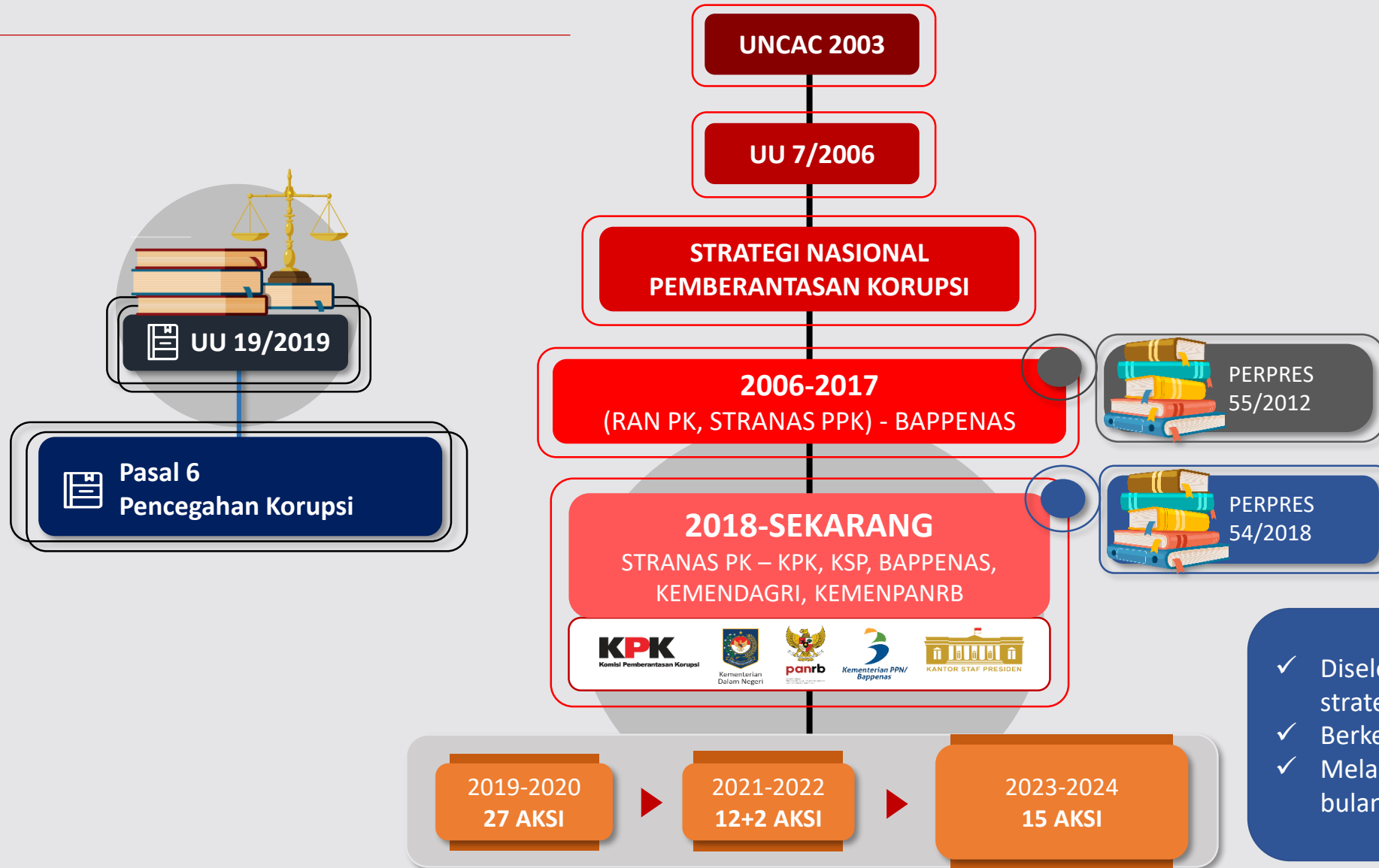
Kementerian PPN/
Bappenas



REFORMASI TATA KELOLA PELABUHAN

STRANAS PK TAHUN 2023-2024





- ✓ Diselarasakan dengan Kebijakan strategis KPK (psl 5)
- ✓ Berkedudukan di KPK (Psl 7)
- ✓ Melaporkan ke Presiden tiap 6 bulan (Psl 10)



FOKUS 1 Perizinan dan Tata Niaga



Aksi 1

Percepatan penyelesaian Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi *one map policy*



Aksi 2

Penguatan pengendalian ekspor dan impor



Aksi 3

Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/ *beneficial ownership* serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara



Aksi 4

Perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan



Aksi 5

Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha

FOKUS 2 Keuangan Negara



Aksi 6

Penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa



Aksi 7

Peningkatan efektifitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah



Aksi 8

Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batu bara



Aksi 9

Penataan aset pusat



Aksi 10

Penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi



Aksi 11

Optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah

FOKUS 3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi



Aksi 12

Penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah



Aksi 13

Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu



Aksi 14

Optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa



Aksi 15

Penguatan implementasi sistem merit

Rantai Logistik Belum Optimal

Biaya Logistik yang tinggi disebabkan oleh rantai logistik yang belum optimal



- AKSI 2021-2022**
Melibatkan 16 Kementerian/Lembaga
- | | | |
|---|--|--|
| 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 4. Kementerian Dalam Negeri | 11. Kementerian Perdagangan |
| 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 5. Kementerian Keuangan | 12. Kementerian UKM dan Koperasi |
| 3. Sekretariat Kabinet | 6. Kementerian Perhubungan | 13. Kementerian Ketenagakerjaan |
| | 7. Kementerian Hukum dan HAM | 14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | 8. Kementerian Kesehatan | 15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB) |
| | 9. Kementerian Pertanian | 16. Kementerian BUMN |
| | 10. Kementerian Kelautan dan Perikanan | |

Proses Pembenahan Pada:	14 Pelabuhan Medan, Batam, Dumai, Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Kendari, Makassar	486 TUKS Tersebar di 14 Pelabuhan	209 TERSUS Tersebar di 14 Pelabuhan
--------------------------------	--	---	---

Lokasi Pelabuhan	Status Penilaian	Identifikasi Masalah
Pelabuhan Belawan - Medan		Ada masalah pada tempat proses pemeriksaan beacukai dan karantina
Pelabuhan Batu Ampar - Batam		Bukan daerah operasional Pelindo
Pelabuhan Cilegon - Banten		Progres sudah Baik
Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta		Ada masalah pada layanan beacukai dan karantina
Pelabuhan Tanjung Mas - Semarang		Progres sudah Baik
Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya		Progres sudah Baik
Pelabuhan Balikpapan		Progres sudah Baik
Pelabuhan Samarinda		Progres sudah Baik
Pelabuhan Kendari		Progres sudah Baik
Pelabuhan Makassar		Progres sudah Baik
Pelabuhan Dumai		Ada masalah pada proses pelayanan kapal
Pelabuhan Palembang		Ada masalah pada proses pelayanan kapal dan tempat pemeriksaan beacukai dan karantina
Pelabuhan Lampung		Ada masalah pada proses pelayanan kapal
Pelabuhan Pontianak		Ada masalah pada proses pelayanan kapal

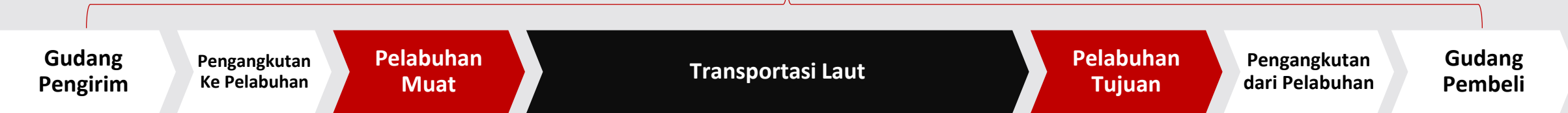
Sumber: Data olah berdasarkan analisis kajian Stranas PK

NEXT PLAN

AKSI PELABUHAN 2023-2024



AKSI 2023-2024



AKSI 2023-2024

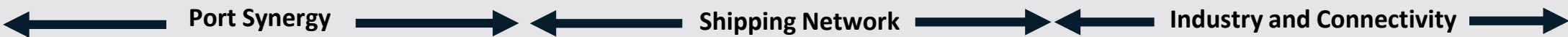
Melibatkan 18 Kementerian/Lembaga

46 Pemerintah Daerah

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sekertariat Kabinet

4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Perhubungan
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Kesehatan
9. Kementerian Pertanian
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. Kementerian Perdagangan
12. Kementerian UKM dan Koperasi
13. Kementerian Ketenagakerjaan
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB)
16. Kementerian BUMN
17. Dan 46 Pemerintah Daerah



Isu Utama	Pelabuhan, BUP, TUKS, TERSUS, PLB, KB	Jaringan Pengiriman Tidak Optimal	Inefisiensi Dalam Transportasi dan Ketidakseimbangan Kargo
Proses Pembenahan Pada:	1. 260 Pelabuhan 2. 462 BUP 3. 1200 TUKS/TERSUS 4. 203 Pusat Logistik Berikat 5. 1404 Kawasan Berikat	1. Perluasan SSm Pengangkut 2. Perluasan SSm Kepabeanan Karantina 3. Penerapan 6 indikator layanan NLE lainnya 4. Warehouse Connectivity	1. Pembenahan tata kelola dasar kepelabuhanan 2. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan memangkas biaya distribusi

Aksi Perbaikan Tata Kelola di Kawasan Pelabuhan

LATAR BELAKANG

Biaya dan waktu layanan tidak terukur

Proses layanan melibatkan banyak pihak dan tidak terintegrasi



EXPECTED OUTPUT/UPAYA PENCEGAHAN

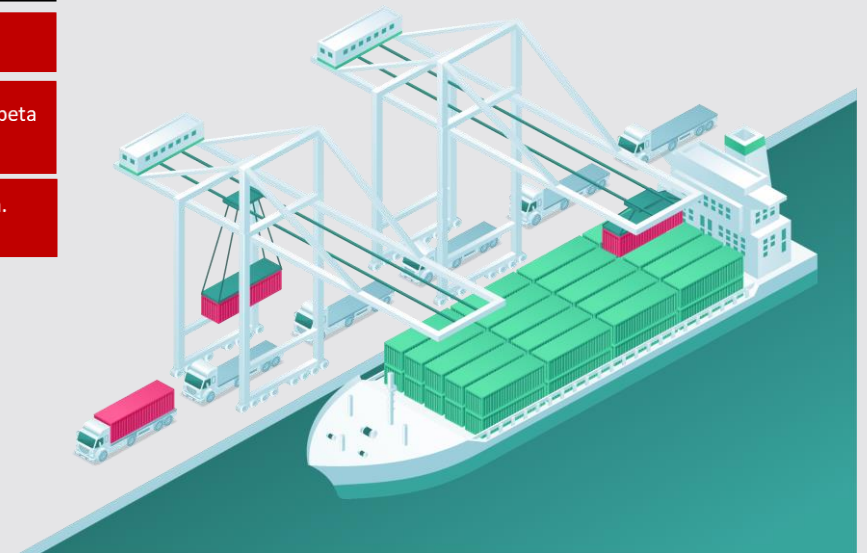
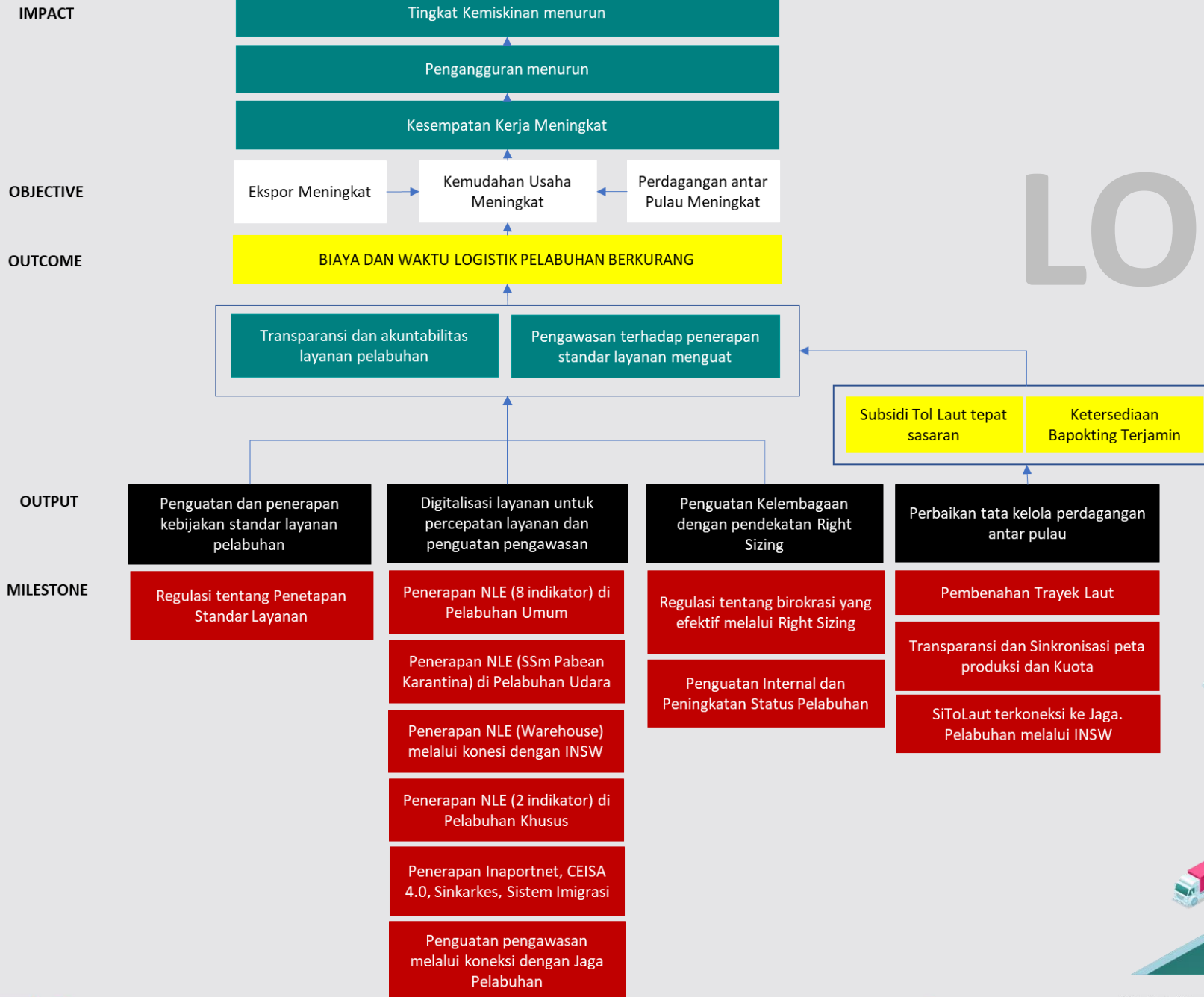
- Penguatan dan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan
- Digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan
- Penguatan Kelembagaan dengan pendekatan Right Sizing
- Perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau

Kementerian/Lembaga/ Pemda Pelaksana

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kementerian Perhubungan
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Kementerian Kesehatan
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Kementerian Perdagangan
13. Kementerian Perindustrian
14. Kementerian Koperasi UKM
15. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
16. PT Pelabuhan Indonesia
17. PT Angkasa Pura I
18. PT Angkasa Pura II
19. 46 Pemerintah Daerah

LOGFRAME

2023-2024



No	Nama Pelabuhan	No	Nama Pelabuhan
1	Pelabuhan Gresik	17	Pelabuhan Laut Maritaeng
2	Pelabuhan Laut Tanjung Wangi	18	Pelabuhan Teluk Bayur
3	Pelabuhan Tri Sakti	19	Pelabuhan Laut Bengkalis
4	Pelabuhan Benoa	20	Pelabuhan Laut Selat Panjang
5	Pelabuhan Jambi	21	Pelabuhan Palu
6	Pelabuhan Bitung	22	Pelabuhan Laut Lhokseumawe
7	Pelabuhan Ambon	23	Pelabuhan Laut Sabang
8	Pelabuhan Laut Kijang	24	Pelabuhan Laut Kuala Langsa
9	Pelabuhan Laut Pulau Bulan	25	Pelabuhan Laut Krueng Geukueh
10	Pelabuhan Laut Tanjung Uban	26	Pelabuhan Laut Cirebon
11	Pelabuhan Laut Sri Bintang Pura	27	Pelabuhan Tanjung Intan
12	Pelabuhan Laut Sribayintan Kijang	28	Pelabuhan Laut Cappa Ujung
13	Pelabuhan Laut Bandar Bentan Telani	29	Pelabuhan Laut Teluk Nibung
14	Pelabuhan Laut Balai Karimun	30	Pelabuhan Nunukan
15	Pelabuhan Laut Wini	31	Pelabuhan Merauke
16	Pelabuhan Laut Tenau	32	Pelabuhan Laut Pulau Baai

No	Nama Pelabuhan	Provinsi	Kab / Kota
1	Lhokseumawe	Aceh	Lhokseumawe
2	Pulau Baai	Bengkulu	Bengkulu
3	Nunukan	Kalimantan Utara	Nunukan
4	Tarakan	Kalimantan Utara	Tarakan
5	Kijang	Kepulauan Riau	Bintan
6	Letung	Kepulauan Riau	Kep Anambas
7	Tarempa	Kepulauan Riau	Kep Anambas
8	Selat Lampa	Kepulauan Riau	Natuna
9	Subi	Kepulauan Riau	Natuna
10	Serasan	Kepulauan Riau	Natuna
11	Midai	Kepulauan Riau	Natuna
12	Bula	Maluku	Ambon
13	Wini	NTT	Timor Tengah
14	Kupang	NTT	Kupang
15	Ereke	Sulawesi Tenggara	Buton Utara
16	Raha	Sulawesi Tenggara	Muna
17	Sikeli	Sulawesi Tenggara	Bombana
18	Wanci	Sulawesi Tenggara	Wakatobi
19	Gunung Sitoli	Sumatera Utara	Gunung Sitoli
20	Tanjung Perak	Jawa Timur	Surabaya
21	Tanjung Priok	DKI Jakarta	Jakarta
22	Teluk Bayur	Sumatera Barat	Padang
23	Makassar	Sulawesi Selatan	Makassar
24	Bitung	Sulawesi Utara	Manado
25	Kupang	NTT	Kupang

32 Pelabuhan

Impelemntasi NLE

25 Pelabuhan

Perdagangan Antar Pulau

151 Pelabuhan Penerapan Sistem Dasar CIQP

No	Nama Pelabuhan
1	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagan Siapi-api;
2	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju;
3	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Beringin;
4	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Linau Bintuhan;
5	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa;
6	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara;
7	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta;
8	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Gilimanuk;
9	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida;
10	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Atapupu;
11	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Reo;
12	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka;
13	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete;
14	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang;
15	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Rangka Ilung;
16	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb;
17	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Amurang;
18	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna;
19	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo;
20	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk;
21	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Banggai;
22	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha;
23	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe;
24	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Garongkong;
25	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo;
26	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bulukumba;
27	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji;
28	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki;
29	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual;
30	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu;
31	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Namlea;
32	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang;
33	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni;
34	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat;
35	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako;
36	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Serui;
37	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire;
38	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan;
39	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Singkil;
40	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang;

41	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang;
42	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh;
43	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Dalam;
44	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu;
45	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa;
46	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Tello;
47	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leidong;
48	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang;
49	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Barus;
50	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bantahan;
51	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siuban;
52	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Muara Siberut;
53	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap;
54	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung;
55	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Medang;
56	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan;
57	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
58	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dabo Singkep;
59	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Senayang;
60	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Mendahara;
61	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang;
62	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Lumpur;
63	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni Enggano;
64	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung;
65	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai;
66	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Menggala;
67	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji;
68	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai;
69	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu;
70	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Ratu;
71	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran;
72	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang;
73	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana;
74	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang;
75	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa;
76	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brondong;
77	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru;
78	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bawean;
79	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapudi;
80	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapeken;

151 Pelabuhan Penerapan Sistem Dasar CIQP

No	Nama Pelabuhan
81	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembo;
82	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu;
83	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan;
84	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baa;
85	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo;
86	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot;
87	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa;
88	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba;
89	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lewoleba;
90	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;
91	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sape;
92	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai;
93	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Melano;
94	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan;
95	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paloh;
96	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Padang Tikar;
97	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap;
98	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Sigintung;
99	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja;
100	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sangkulirang;
101	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Santan;
102	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu;
103	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk;
104	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang;
105	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kotabunan;
106	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane;
107	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau;
108	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki;
109	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pagimana;
110	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ogoamas;
111	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Parigi;
112	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok;
113	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana;
114	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Poso;
115	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bunta;
116	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa;
117	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar;
118	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jampea;
119	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai;
120	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto;

121	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pattiro Bajo;
122	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa;
123	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka;
124	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko;
125	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wanci;
126	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Belang-Belang;
127	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene;
128	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang;
129	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tilamuta;
130	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Namrole;
131	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amahai;
132	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wonreli;
133	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bula;
134	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo;
135	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Geser;
136	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kairatu;
137	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buli;
138	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Laiwui;
139	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Daruba;
140	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Soasio;
141	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo;
142	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Agats;
143	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waren;
144	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade;
145	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Korido;
146	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sarmi;
147	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Oransbari;
148	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teminabuan;
149	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wasior;
150	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana;
151	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kokas.



STRANAS PK

**SEKRETARIAT NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
(SETNAS PK)**



Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada No.4,
Setiabudi, Jakarta - Indonesia



021-25578300 ext. 8014



<https://stranaspk.kpk.go.id>



@stranaspk_official



STRANAS PK OFFICIAL



Kementerian
Dalam Negeri



panrb
LEMBAGA NASIONAL
PENCEGAHAN DAN
PENYERAJAN KORUPSI



Kementerian PPN/
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN